



# LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) DAN LAPORAN KEGIATAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)

 *Disdukcapilsambas*

 *disdukcapil@sambas.go.id*

 *<https://disdukcapil.sambas.go.id/>*



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SAMBAS**

***TAHUN 2023***

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2023 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2023 ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan laporan ini. Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya.

Akhir kata kami berharap semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca.

Sambas, Januari 2024  
Kepala Dinas Kependudukan Dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas



H. WAHIDAH, SE, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19680530 199403 2 005

## 1. GAMBARAN UMUM

### A. Sejarah Singkat Kabupaten Sambas

Pemerintahan Sambas, pada masa Pemerintahan Belanda merupakan daerah Afdelling Van Singkawang. Setelah Perang Dunia II status Kabupaten Sambas berubah menjadi Afdelling Administratif terbagi menjadi 3 (tiga) daerah, yaitu :

1. Daerah Kesultanan Sambas yang meliputi Onderafdeling Singkawang, Bengkayang, Pemangkat, dan Sambas dengan sebutan kewedanan.
2. Daerah Kerajaan/Penembahan Mempawah.
3. Daerah Kerajaan (Kesultanan) Pontianak dan sebagian daerahnya adalah mandor.

Setelah Perang Dunia II berakhir, daerah ini berubah menjadi daerah otonom Kabupaten Sambas dengan Ibukota Singkawang yang terdiri dari 4 (empat) kewedanan yaitu:

- a. Kewedanan Singkawang
- b. Kewedanan Pemangkat
- c. Kewedanan Sambas
- d. Kewedanan Bengkayang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tanggal 26 Juni 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (LNRI 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang. Disebutkan dalam Pasal 3 ayat 1 : Pemerintah Daerah point 1 menyebutkan Daerah Tingkat II Sambas berkedudukan di Sambas.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang, maka Ibukota Kabupaten Sambas pindah dari Kota Singkawang ke Kota Sambas, sehingga wilayah Kabupaten Sambas tinggal 9 Kecamatan saja (Kecamatan Selakau, Kecamatan Pemangkat, Kecamatan Jawai, Kecamatan Tebas, Kecamatan Sambas, Kecamatan Teluk Keramat, Kecamatan Sejangkung, Kecamatan Paloh dan Kecamatan Sajingan Besar).

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas (H. Tarya Aryanto) Nomor 310.A Tahun 1999 serta persiapan yang melibatkan partisipasi masyarakat, acara pemindahan dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1999

dengan peresmian pemindahan Ibu kota Kabupaten Sambas oleh Gubernur Kalimantan Barat (H. Aspar Aswin), dengan demikian seluruh dinas/instansi yang berada dibawah Pemerintah Kabupaten Sambas secara resmi ikut pindah ke Sambas.

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan di Kabupaten Sambas khususnya dibebberapa kecamatan serta adanya tuntutan aspirasi masyarakat serta dengan persetujuan DPRD, mulai dari tahun 2001 s.d. 2007 ditetapkan pemekaran 10 kecamatan baru di Kabupaten Sambas (Kecamatan Galing, Kecamatan Subah, Kecamatan Tekarang, Kecamatan Semparuk, Kecamatan Jawai Selatan, Kecamatan Sajad, Kecamatan Sebawi, Kecamatan Tangaran, Kecamatan Salatiga dan Kecamatan Selakau Timur), sehingga wilayah Kabupaten Sambas secara keseluruhan menjadi 19 Kecamatan.

## **B. Letak Geografis**

Kabupaten Sambas dengan luas wilayah 6.395,70 km<sup>2</sup> atau 639.570 ha (4,36% dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat), merupakan wilayah Kabupaten yang terletak dibagian paling utara dari wilayah Propinsi Kalimantan Barat. Panjang pantai 198,76 km dengan karakteristik sebagian besar adalah pantai berpasir membentang dari Semelagi hingga Tanjung Datok (Paloh). Panjang pantai tiap kecamatan menurut Lapan (2003) yaitu Kecamatan Selakau (13,51 km), Kecamatan Pemangkat (20,49 km), Kecamatan Jawai (42,53 km), Kecamatan Teluk Keramat (19,67 km), Kecamatan Paloh (102,56 km). Luas wilayah laut 12 mil dari darat : 1.467,84 km<sup>2</sup>.

Dilihat dari letak geografisnya, Kabupaten Sambas terletak diantara 0<sup>o</sup>57'29,8" Lintang Utara dan 2<sup>o</sup>04'53,1" Lintang Utara. 108<sup>o</sup>54'17,0 Bujur Timur dan 109<sup>o</sup>45'7,56" Bujur Timur, dengan batas administratif :

- Utara ; berbatasan dengan Malaysia Timur (Sarawak) dan Laut Natuna
- Selatan ; berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang
- Timur ; berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang dan Serawak
- Barat ; berbatasan dengan Laut Natuna

Wilayah administratif Sambas meliputi 19 Kecamatan yaitu Kecamatan Sambas, Kecamatan Sebawi , Kecamatan Tebas, Kecamatan Semparuk, Kecamatan Pemangkat, Kecamatan Salatiga, Kecamatan Selakau, Kecamatan

Selakau Timur, Kecamatan Tekarang, Kecamatan Jawai, Kecamatan Jawai Selatan, Kecamatan Sajad, Kecamatan Sejangkung, Kecamatan Paloh, Kecamatan Teluk Keramat, Kecamatan Tangaran, Kecamatan Subah, Kecamatan Galing dan Kecamatan Sajingan Besar dengan desa keseluruhan berjumlah 195 desa. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sajingan Besar dengan luas 1.391,20 km<sup>2</sup> atau 21,75%, sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Tekarang dengan luas sebesar 83,16 km<sup>2</sup> atau 1,30% dari luas wilayah Kabupaten Sambas.

Sebagian besar wilayah kabupaten Sambas merupakan wilayah relatif datar (kelerengan 0% - 15%) dengan luas 468.196 hektar atau 67,59%, dan luas wilayah dengan kelerengan 15% - 40% adalah 160.396 hektar atau 25,08%, sedangkan kelas lereng > 40% seluas 46.832 hektar atau 7,3%. Ketinggian wilayah berbeda berdasarkan kecamatan. Ketinggian 0-7 m dpl terdapat: Kecamatan Sejangkung, Sambas, Tebas, Selakau, Jawai, Paloh dan Teluk Keramat. Ketinggian 8–25m dpl terdapat: Kecamatan Sejangkung, Sambas, Tebas, Selakau, Pemangkat dan Teluk Keramat. Ketinggian 26-100m dpl Kecamatan Sejangkung, Sambas, Tebas, Selakau, Pemangkat, Teluk Keramat dan Paloh.

Pada Dasarnya jenis tanah di Kabupaten Sambas terdiri dari organosol 23%, alluvial/entisol 36%, podsol 7%, latasol 11% dan padosolik merah kuning/ultisol 25%. Secara umum Kabupaten Sambas memiliki 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan total hamparan 516.200 ha atau 80,71% dari luas wilayah Kabupaten Sambas, meliputi :

- DAS Paloh : 64.375 ha.
- DAS Sambas : 245.700 ha (sungai sambas, sungai sambas kecil, sungai kumba sajingan)
- DAS. Sebangkau : 193.125 ha (sungai sebangkau dan selakau).

## 2. PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pada tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas melaksanakan program kerja dan kegiatan sebagai berikut.

Tabel 1  
Program Kerja, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	APBD
			b. Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	APBD
			c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	APBD
			d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	APBD
			e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	APBD
			f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	APBD
			g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	APBD
		b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	APBD
			b. Pelaksanaan Penausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	APBD
			c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	APBD
			d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	APBD

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER DANA
			e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	APBD
		c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	APBD
			b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	APBD
			c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	APBD
		d. Administrasi Kepegawaian Daerah pada Perangkat Daerah	a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	APBD
			b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	APBD
		e. Administrasi Umum Perangkat Daerah	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	APBD
			b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	APBD
			c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	APBD
			d. Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	APBD
			e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	APBD
			f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	APBD
			g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	APBD

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER DANA		
		f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	APBD		
			b. Pengadaan Mebel	APBD		
			c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	APBD		
		d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	APBD		
			b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	APBD		
		e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	APBD		
			b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	APBD		
			c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	APBD		
			d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	APBD		
		f. Penataan Organisasi	a. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	APBD		
			b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	APBD		
		2.	Program Pendaftaran Penduduk	1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk	a. Pendataan Penduduk non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	APBD

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER DANA
			b. Penyelesaian Masalah Penduduk	APBD
			c. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	APBD
			d. Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	APBD
		2) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	a. Pelayanan Secara Akif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa terkait Pendaftaran Penduduk	APBD
			b. Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	APBD
		3) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	a. Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	APBD
3.	Program Pencatatan Sipil	1) Pelayanan Pencatatan Sipil	a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	APBD
			b. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	APBD
		2) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	a. Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk Bagi Penduduk yang beragama Islam	APBD

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER DANA
			b. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	APBD
			c. Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	APBD
		3) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	a. Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	APBD
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1) Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database	a. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	APBD
		2) Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	APBD
		3) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a. Fasilitasi terkait Pengelolaan Administrasi Kependudukan	APBD
			b. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	APBD
			c. Sosialisasi terkait Pengelolaan Administrasi Kependudukan	APBD

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER DANA
			d. Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	APBD
			e. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan masyarakat	APBD
		4) Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a. Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Adminduk dan Pendayagunaan Data Kependudukan	APBD
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1) Penyusunan Profil Kependudukan	a. Penyediaan data Kependudukan Kabupaten/Kota	APBD
			b. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	APBD

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan diharapkan dapat dicapai melalui 5 (Lima) Program yang dilaksanakan dengan 20 (Dua Puluh) Kegiatan dan 57 (Lima Puluh Tujuh) Sub Kegiatan, adapun program dan kegiatan beserta outputnya adalah sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan dan sub kegiatan sbb:
  - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
    - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah  
Output : Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah : 1 dokumen
    - b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD  
Output : Jumlah dokumen RKA SKPD : 1 dokumen
    - c. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD

- Output : Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD : 1 dokumen
- d. Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD  
Output : Jumlah dokumen DPA SKPD : 1 dokumen
- e. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD  
Output : Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD : 1 dokumen
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi  
Output : Jumlah dokumen laporan capaian kinerja (IKU) dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD : 1 dokumen
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Output : Jumlah dokumen hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat : 4 dokumen
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN  
Output : Jumlah laporan administrasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN : 26 laporan
- b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD  
Output : Jumlah laporan administrasi honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan yang dibayarkan : 1 laporan
- c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD  
Output : Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD : 1 laporan
- d. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD  
Output : Jumlah laporan keuangan bulanan SKPD : 12 laporan
- e. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran  
Output : Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran : 1 laporan
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah  
Output : Jumlah laporan RKBMD : 1 laporan
- b. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD  
Output : : Jumlah laporan barang milik daerah : 1 laporan
- c. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD  
Output : Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD : 1 laporan
- 4) Administrasi Kepegawaian Daerah pada Perangkat Daerah
- a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya  
Output : Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas

- beserta atribut kelengkapannya : 75 orang
- b. Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian  
Output : - Jumlah jasa tenaga non PNS : 34 orang  
- Jumlah laporan kepegawaian : 1 laporan
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor  
Output : Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor : 9 jenis
  - b. Penyediaan peralatan rumah tangga  
Output : - Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga: 24 jenis  
- Jumlah retribusi sampah : 12 bulan
  - c. Penyediaan bahan logistik kantor  
Output : Jumlah dan jenis bahan logistik kantor (ATK) : 49 jenis
  - d. Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan  
Output : Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan : 13 jenis
  - e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  
Output : jumlah rekening bahan bacaan : 3 rekening
  - f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi  
Output : Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD : 12 laporan
  - g. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD  
Output : Jumlah laporan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD : 1 laporan
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan  
Output : Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan: 1 unit
  - b. Pengadaan mebel  
Output : Jumlah dan jenis mebel : 6 unit
  - c. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya  
Output : Jumlah dan jenis sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya: 12 bulan
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan jasa surat menyurat  
Output : Jumlah materai : 490 lembar
  - b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

- Output : Jumlah rekening jasa komunikasi sumber daya air dan listrik : 12 rekening
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional  
Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik : 2 unit
- b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya  
Output : Jumlah komputer dan alat pendukungnya yang terawat dengan baik : 85 unit
- c. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya  
Output : Jumlah gedung kantor yang terawat dengan baik : 1 gedung
- d. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya  
Output : Jumlah dan jenis sarpras gedung kantor yang terawat dengan baik : 6 jenis
- 9) Penataan Organisasi
- a. Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi  
Output : Jumlah laporan pelaksanaan RB dan Evaluasi RB : 1 laporan
- b. Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintahan daerah  
Output : Jumlah laporan kinerja pemerintah daerah : 1 laporan

## II. Program Pendaftaran Penduduk

- 1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- a. Pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan  
Output : jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan : 1 dokumen
- b. Penyelesaian masalah penduduk  
Output : Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk : 1 dokumen
- c. Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk  
Output : Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk : 1 dokumen
- d. Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan  
Output : jumlah dokumen pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan : 1 dokumen
- 2) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

- a. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan peristiwa terkait pendaftaran penduduk  
Output : Jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan peristiwa terkait pendaftaran penduduk : 1 laporan
  - b. Sosialisasi pendaftaran penduduk  
Output : Jumlah laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk : 1 laporan
- 3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk
- a. Bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk  
Output : Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk : 1 laporan

### III. Program Pencatatan Sipil

- 1) Pelayanan Pencatatan Sipil
- a. Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting  
Output : Jumlah dokumen hasil Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting : 1 dokumen
  - b. Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil  
Output : Jumlah dokumen hasil peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil : 1 dokumen
- 2) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
- a. Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama Kabupaten/Kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam  
Output : Jumlah laporan hasil koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama Kabupaten/Kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam : 1 laporan
  - b. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil  
Output : Jumlah laporan hasil Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil : 1 laporan
  - c. Sosialisasi terkait pencatatan sipil  
Output : Jumlah laporan hasil sosialisasi pencatatan sipil : 1 laporan
- 3) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
- a. Bimbingan teknis terkait pencatatan sipil

Output : Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil : 1 laporan

#### IV. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1) Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database

a. Kerjasama pemanfaatan data kependudukan

Output : Jumlah inovasi pelayanan adminduk : 1 inovasi

2) Penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan

a. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Output : Jumlah dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyelenggara adminduk terkait pengelola informasi administrasi kependudukan : 1 dokumen

3) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

a. Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Output : Jumlah laporan hasil fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan : 1 laporan

b. Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan

Output : - Jumlah dokumen pemanfaatan data kependudukan : 13 dokumen  
- Jumlah OPD yang melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan : 13 OPD

c. Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Output : Jumlah laporan hasil sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan : 1 laporan

d. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi

Output : Jumlah dokumen kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi : 2 dokumen

e. Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat

Output : Jumlah laporan hasil Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat : 1 laporan

4) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan

a. Bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan

Output : Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan : 1 laporan

#### V. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

1) Penyusunan Profil Kependudukan

a. Penyediaan data Kependudukan Kabupaten/Kota

Output : - jumlah buku Data Agregat Kependudukan (DAK)  
Semester 2 : 10 buku  
- jumlah buku Data Agregat Kependudukan (DAK)  
Semester 1 : 10 buku

b. Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain

Output : jumlah buku profil data perkembangan kependudukan :  
50 buku

### **3. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN**

Realisasi program dan kegiatan digambarkan dari realisasi fisik dan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Desember 2023. Realisasi tersebut dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2

Realisasi Fisik dan Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Menurut DPA	Keuangan		
			Real	Sisa Anggaran	Pers
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	8.041.783.200,00	8.003.241.213,00	38.542.644,00	99,52
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.186.376,00	37.186.376,00	0,00	100,00
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.016.728,00	3.016.728,00	0,00	100,00
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.421.264,00	4.421.264,00	0,00	100,00
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.178.981,00	3.178.981,00	0,00	100,00
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3.424.136,00	3.424.136,00	0,00	100,00
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3.323.045,00	3.323.045,00	0,00	100,00
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.551.259,00	2.551.259,00	0,00	100,00
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.270.963,00	17.270.963,00	0,00	100,00
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.741.613.472,00	3.730.348.862,00	11.264.610,00	99,70

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Menurut DPA	Keuangan		
			Real	Sisa Anggaran	Pers
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.571.888.304,00	3.560.623.694,00	11.264.610,00	99,68
2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	158.400.000,00	158.400.000,00	0,00	100,00
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.053.720,00	3.053.720,00	0,00	100,00
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.935.198,00	3.935.198,00	0,00	100,00
2.12.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.336.250,00	4.336.250,00	0,00	100,00
<b>2.12.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	<b>11.714.819,00</b>	<b>11.188.319,00</b>	<b>526.500,00</b>	<b>95,50</b>
2.12.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.861.377,00	3.334.877,00	526.500,00	86,36
2.12.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	2.328.345,00	2.328.345,00	0,00	100,00
2.12.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.525.097,00	5.525.097,00	0,00	100,00
<b>2.12.01.2.05.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>779.277.109,00</b>	<b>778.409.037,00</b>	<b>868.072,00</b>	<b>98,88</b>
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	41.490.000,00	41.490.000,00	0,00	100,00
2.12.01.2.05.03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	737.787.109,00	736.919.037,00	868.072,00	99,88

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Menurut DPA	Keuangan		
			Real	Sisa Anggaran	Pers
<b>2.12.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>983.336.948,00</b>	<b>982.823614,00</b>	<b>513.334,00</b>	<b>99,95</b>
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.936.810,00	100.936.810,00	0,00	100,00
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	129.362.884,00	129.358.446,00	4.438,00	100,00
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	89.121.599,00	88.988.684,00	132.915,00	99,85
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	86.264.200,00	86.264.134,00	66,00	100,00
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.005.000,00	4.000.000,00	5.000,00	99,88
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	386.296.384,00	386.019.469,00	276.915,00	99,93
2.12.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	187.350.071,00	187.256.071,00	94.000,00	99,95
<b>2.12.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>739.280.000,00</b>	<b>726.069.750,00</b>	<b>13.210.250,00</b>	<b>998,21</b>
2.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	427.290.000,00	426.990.000,00	300.000,00	99,93
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	18.900.000,00	16.372.500,00	2.527.500,00	86,63
2.12.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	293.090.000,00	282.707.250,00	10.382.750,00	96,46

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Menurut DPA	Keuangan		
			Real	Sisa Anggaran	Pers
2.12.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288.471.352,00	282.669.347,00	5.802.005,00	97,98
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	284.071.352,00	278.269.347,00	5.802.005,00	97,96
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.395.051.993,00	1.387.884.287,00	7.7167.706,00	99,49
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.449.900,00	100.593.900,00	856.000,00	99,16
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.750.000,00	53.686.000,00	64.000,00	99,88
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	109.999.000,00	105.905.000,00	4.904.000,00	96,28
2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.129.853.093,00	1.128.509.387,00	1.343.706,00	99,88
2.12.01.2.13	Penataan organisasi	65.851.788,00	65.851.621,00	167,00	100,00
2.12.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	61.890.676,00	61.890.509,00	167,00	100,00
2.12.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah	3.961.112,00	3.961.112,00	0,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Menurut DPA	Keuangan		
			Real	Sisa Anggaran	Pers
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.509.028.954,00	1.508.742.482,00	286.472,00	99,98
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.230.043.969,00	1.229.823.547,00	220.422,00	99,98
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	19.999.911,00	19.999.911,00	0,00	100,00
2.12.02.2.01.03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	24.999.639,00	24.999.639,00	0,00	100,00
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.165.044.492,00	1.164.844.860,00	199.632,00	99,98
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	19.999.927,00	19.979.137,00	20.790,00	99,90
2.12.02.2.03.	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	253.985.024,00	253.918.974,00	66.000,00	99,97
2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	228.992.074,00	228.926.074,00	66.000,00	99,97
2.12.02.2.03.05	Sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk	24.992.950,00	24.992.900,00	50,00	100,00
2.12.02.2.04	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	24.999.961,00	24.999.9661,00	0,00	100,00
2.12.02.2.04.03	Bimbingan teknis terkait pendaftaran	24.999.9661,00	24.999.9661,00	0,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Menurut DPA	Keuangan		
			Real	Sisa Anggaran	Pers
	penduduk				
<b>2.12.03</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>414.973.840,00</b>	<b>411.878.740,00</b>	<b>3.095.100,00</b>	<b>99,25</b>
<b>2.12.03.2.01</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>187.892.971,00</b>	<b>186.602.871,00</b>	<b>1.290.100,00</b>	<b>99,32</b>
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	20.000.640,00	20.000.640,00	0,00	100,00
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	167.892.331,00	166.602.231,00	1.290.100,00	99,23
<b>2.12.03.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>227.080.869,00</b>	<b>225.275.869,00</b>	<b>1.805.000,00</b>	<b>99,20</b>
2.12.03.2.02.01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk Bagi Penduduk yang beragama Islam	20.000.030,00	20.000.030,00	0,00	100,00
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	157.080.746,00	156.085.746,00	995.000,00	99,37
2.12.03.2.02.08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	50.000.093,00	49.190.093,00	810.000,00	98,38
<b>2.12.03.2.03</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.12.03.2.03.04	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Menurut DPA	Keuangan		
			Real	Sisa Anggaran	Pers
	Sipil				
<b>2.12.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>536.281.516,00</b>	<b>532.699.522,00</b>	<b>3.581.994,00</b>	<b>99,33</b>
<b>2.12.04.2.01</b>	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database</b>	<b>100.000.306,00</b>	<b>99.589.206,00</b>	<b>411.100,00</b>	<b>99,59</b>
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	100.000.306,00	99.589.206,00	411.100,00	99,59
<b>2.12.04.2.02.</b>	<b>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>84.596.697,00</b>	<b>84.542.379,00</b>	<b>54.318,00</b>	<b>99,94</b>
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	84.596.697,00	84.542.379,00	54.318,00	99,94
<b>2.12.04.2.03.</b>	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>335.854.764,00</b>	<b>332.815.675,00</b>	<b>3.039.089,00</b>	<b>99,09</b>
2.12.04.2.03.03	Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	95.536.766,00	95.098.156,00	438.610,00	99,54
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	120.000.346,00	118.097.399,00	1.902.947,00	98,41
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi	25.806.159,00	25.806.159,00	0,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Menurut DPA	Keuangan		
			Real	Sisa Anggaran	Pers
	Administrasi Kependudukan				
2.12.04.2.03.06	Kerjasama dengan Organisasi Perguruan Tinggi	74.999.897,00	74.302.365,00	697.532,00	99,07
2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	19.511.596,00	19.511.596,00	0,00	100,00
<b>2.12.04.2.04.</b>	<b>Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>15.829.749,00</b>	<b>15.752.262,00</b>	<b>77.487,00</b>	<b>99,51</b>
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendencygunaan Data Kependudukan	15.829.749,00	15.752.262,00	77.487,00	99,51
<b>2.12.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFILKEPENDUDUKAN</b>	<b>63.719.033,00</b>	<b>62.958.555,00</b>	<b>760.478,00</b>	<b>98,80</b>
<b>2.12.05.2.01.</b>	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>63.719.033,00</b>	<b>62.958.555,00</b>	<b>760.478,00</b>	<b>98,80</b>
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	31.241.100,00	30.861.800,00	379.300,00	98,79
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	32.477.933,00	32.096.755,00	381.178,00	98,83

Sumber : RFK Disdukcapil Kab. Sambas Tahun 2023

**4. TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) ATAU HASIL – HASIL YANG DI CAPAI SEBAGAI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN.**

Mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Sambas. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut.

Tabel 3  
Jenis Pelayanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal	Capaian SPM Tahun 2023 (%)	Target SPM	
		Indikator		Nilai (%)	Tahun Pencapaian
1	Pelayanan Dokumen Kependudukan	1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	100,00	100,00	2023
		2. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	97,76	99,40	2023
		3. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	61,24	52,00	2023
		4. Cakupan Penerbitan Akta Kematian	36,61	26,00	2023

**Indikator-1 : Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)**

$$\text{Persentase (\%)} \text{ Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)} = \frac{\sum \text{KK yang diterbitkan}}{\sum \text{Kepala Keluarga}} \times 100\%$$

Definisi:

Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) adalah cakupan Kartu Keluarga yang telah diterbitkan serta telah diterima oleh Kepala Keluarga di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Data yang diperlukan:

Tabel 4  
Jumlah KK yang diterbitkan

Tahun	Jumlah KK yang diterbitkan serta telah diterima Kepala Keluarga di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (orang)	Jumlah Kepala Keluarga disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama (orang)	Persentase
2023	196,649	196,649	100
2022	192.270	192.270	100
2021	187.092	187.092	100
2020	178.807	178.807	100
2019	180.589	180.589	100
2018	212.545	212.545	100

Sumber : Data IKU Tahun 2023

**Indikator-2 : Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)**

$$\text{Persentase (\% Cakupan Penerbitan KTP Elektronik)} = \frac{\sum \text{KTP Elektronik yang diterbitkan}}{\sum \text{Penduduk Wajib KTP Elektronik}} \times 100\%$$

Definisi:

Cakupan Penerbitan KTP Elektronik adalah cakupan KTP Elektronik yang telah diterbitkan serta telah diterima oleh wajib KTP Elektronik di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Data yang diperlukan:

Tabel 5  
Jumlah KTP elektronik yang diterbitkan

Tahun	Jumlah KTP Elektronik yang diterbitkan serta telah diterima Wajib KTP Elektronik di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (orang)	Jumlah penduduk wajib KTP Elektronik di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama (orang)	Persentase (%)
2023	443.820	453.998	97,76
2022	467.592	461.972	101,22
2021	451.450	455.762	99,05
2020	444.480	450.244	98,72
2019	430.630	446.059	96,54
2018	417.132	443.953	93,9

Sumber : Data IKU Tahun 2023

### Indikator-3 : Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran

$$\text{Persentase (\%) Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran} = \frac{\sum \text{Kutipan Akte Kelahiran yang diterbitkan}}{\sum \text{Kelahiran Yang Terjadi}} \times 100\%$$

**Definisi:**

Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran adalah cakupan Akte Kelahiran yang telah diterbitkan serta telah diterima oleh pemohon Akte Kelahiran di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Data yang diperlukan:

Tabel 6  
Jumlah Akte Kelahiran yang diterbitkan

Tahun	Jumlah Akte Kelahiran yang diterbitkan serta diterima pemohon Akte Kelahiran disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (orang)	Jumlah Kelahiran yang terjadi di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama (orang)	Persentase
2023	394.000	643.405	61,24
2022	336.565	640.578	52,54
2021	25.906	7.991	324,19
2020	24.417	7.294	334,75
2019	21.566	7.070	305,04
2018	17.711	7.212	245,5

Sumber : Data IKU Tahun 2023

### Indikator-4 : Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kematian

$$\text{Persentase (\%) Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kematian} = \frac{\sum \text{Kutipan Akte Kematian yang diterbitkan}}{\sum \text{Kematian Yang Terjadi}} \times 100\%$$

**Definisi:**

Cakupan Penerbitan Kutipan Akte kematian adalah cakupan Akte Kematian yang telah diterbitkan serta telah diterima oleh pemohon Akte Kematian di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Data yang diperlukan:

**Tabel 7**  
Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan

Tahun	Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan serta telah diterima pemohon akta kematian di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (orang)	Jumlah Kematian yang terjadi di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama (orang)	Persentase
2023	10.037	27.419	36,61
2022	22.372	22.598	99,00
2021	1.615	14.757	10,94
2020	963	10.231	9,41
2019	656	2395	27,4
2018	218	3892	5.6

Sumber : Data IKU Tahun 2023

## 5. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil. Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretaris,
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil ;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan;
- f. Bidang Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:

**6. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL**

Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tahun 2023 berjumlah 28 orang PNS, dan 11 P3K yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8  
Pegawai Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Sambas 2023

NO.	N A M A	N I P / N I P P K	PANGKAT T GOL/ RUANG	JABATAN	PENDIDIKAN		
					NAMA	TAHUN LULUS	TINGKAT IJAZAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Hj.WAHIDAH, SE.,M.Si	19680530 199403 2 005	IV/c	Kepala Dinas	S.2 SOSIAL POLITIK	1998	S.2
2.	HENNY SUSANTI W,SE	19660403 199603 2 003	IV/b	Sekretaris	S.1 ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN	1992	S.1
3.	AGUSMINI ERAWATI,SE	19750304 200312 2 004	IV/a	Kabid Pemanfaatan Data Inovasi Pelayanan	S.1 ILMU EKONOMI	2000	S.1
4.	YUSIRANI, S. Kom	19770825 200212 2 004	IV/a	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	S.1 MANAJEMEN INFORMATIKA	1999	S.1
5.	MUSLIM, ST	19820212 200502 1 006	IV/a	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	TEKNIK INFORMATIKA	2004	S.1

NO.	NAMA	NIP / NIPPPK	PANGKAT T GOL/ RUANG	JABATAN	PENDIDIKAN		
					NAMA	TAHUN LULUS	TINGKAT IJAZAH
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	ARI ADRIAN, S. Kom, M.AP	19821502 210902 1 005	III/d	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	S.2 ILMU SOSIAL POLITIK	2017	S.2
7.	ERNA SURIANI, SE	19660716 198703 2 003	III/d	Jafung Administrator Database Kependudukan	EKONOMI AKUNTANSI	2010	S.1
8.	RUSDIANA, SE	19691007 199203 2 010	III/c	Jafung Administrator Database Kependudukan	EKONOMI AKUNTANSI	2010	S.1
9.	MARLIANA,S.Sos	19700924 210812 2 002	III/d	Jafung Administrator Database Kependudukan	ADMINISTRASI NEGARA	1996	S.1
10.	DIVA LIANITA, SE	19820730 200902 2 005	III/c	Jafung Perencana	MANAJEMEN	2004	S.1
11.	SITI RAHMAH, S.AP	19830602 200502 2 002	III/c	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	ADMINISTRASI NEGARA	2004	S.1
12.	YUNARNI	19700126 199603 2 001	III/b	Pengadministrasi Kependudukan	FISIKA	1989	SLTA
13.	EDRIANI, A. Md	19821217 210902 1 003	III/b	Pengelola Mutasi Penduduk	MANAJEMEN INFORMATIKA	2006	D.III
14.	U.ROBI YUSHANDA, S.Akun	19840522 200902 1 002	III/b	Penyusun Bahan Publikasi dan Informasi	AKUNTANSI	2017	S.1

NO.	NAMA	NIP / NIPPPK	PANGKAT GOLT RUANG	JABATAN	PENDIDIKAN		
					NAMA	TAHUN LULUS	TINGKAT IJAZAH
1		3	4	5	6	7	8
15.	NAZARI HADANI, A.Md	19790601 200902 1 003	III/b	Pengelola Kepegawaian	MANAJEMEN PERKANTORAN	2003	D.III
16.	SILVIA WULANDARI, S.Hum	19820831 200606 2 011	III/a	Bendahara	IPA	2000	SLTA
17.	SRI KURNIATI, S.Hum	19830525 200801 02 011	III/a	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM	2017	S.1
18.	IKMAL SAMSURI, SE	19850602 201902 1 002	III/a	Analisis Data dan Informasi	EKONOMI	2018	S.1
19.	RUSTIAN, S.I.P	19850819 201001 1 003	III/a	Pemeriksa Kependudukan	ILMU PEMERINTAHAN	2017	S.1
20.	SYARIF NURIZWAN, S.Sos	19960708 201902 1 002	III/a	Analisis Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi	ADMINISTRASI NEGARA	2018	S.1
21.	DEDE ISMANTO, S.Kom	19930422 202203 1 005	III/a	Administrator Database Kependudukan ( Ahli Pertama )	TEKNIK INFORMASI	2018	S.1
22.	DIDI MAULIANA, S.Kom	19871229 202203 1 001	III/a	Administrator Database Kependudukan ( Ahli Pertama )	TEKNIK INFORMASI	2012	S.1

NO.	N A M A	N I P / N I P P K	PANGKA T GOL/ RUANG	JABATAN	PENDIDIKAN		
					NAMA	TAHUN LULUS	TINGKAT IJAZAH
1	2	3	4	5	6	7	8
23.	DARMANTO	19700607 200604 1 003	II/d	Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian	IPA	1991	SLTA
24.	HANAFI	19740701 200604 1 014	II/d	Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian	IPS	1995	SLTA
25.	RUSIHAN	19760901 200801 1 005	II/d	Pengadministrasi Kependudukan	BAHASA	1996	SLTA
26.	NOVI MARIYANTI	19821027 210701 2 013	II/c	Pengadministrasi Kependudukan	SOSIAL	2001	SLTA
27.	U. DELVI MAULANA, A.Md	19861204 202203 1 002	II/c	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Terampil)	MANAJEMEN INFORMATIKA	2010	D.III
28.	IFRAN AUGISTIANSYAH, A.Md.Kom	19980820 202203 1 004	II/c	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Terampil)	MANAJEMEN INFORMATIKA	2019	D.III
29.	ELYSA, S.Kom	19840914 202221 2 001	IX	Administrator Database Kependudukan ( Ahli Pertama )	SISTEM INFORMASI	2006	S.1

NO.	N A M A	N I P / N I P P P K	PANGKAT T GOL/ RUANG	JABATAN	PENDIDIKAN		
					NAMA	TAHUN LULUS	TINGKAT IJAZAH
1	2	3	4	5	6	7	8
30.	RENY SEFTIYANTINI, S.Kom	19870901 202221 2 002	IX	Administrator Database Kependudukan ( Ahli Pertama )	SISTEM INFORMASI	2010	S.1
31.	IBNU HADI, S.T.	19880710 202221 1 002	IX	Administrator Database Kependudukan ( Ahli Pertama )	TEKNIK INFORMATIKA	2014	S.1
32.	M. ANDRI, S.Kom	19890210 202221 1 001	IX	Administrator Database Kependudukan ( Ahli Pertama )	SISTEM INFORMASI	2012	S.1
33.	ANDIKO ANPRAKA SUMANTRI, S.Kom	19920603 202221 1 002	IX	Administrator Database Kependudukan ( Ahli Pertama )	SISTEM INFORMASI	2014	S.1
34.	TRI KENCONO, A.Md	19850424 202221 1 001	VII	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Terampil)	MANAJEMEN INFORMATIKA	2016	D.III

NO.	NAMA	NIP / NIPPPK	PANGKAT T GOL/ RUANG	JABATAN	PENDIDIKAN		
					NAMA	TAHUN LULUS	TINGKAT IJAZAH
1	2	3	4	5	6	7	8
35.	AAN, A.Md	19880926 202221 1 001	VII	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Terampil)	MANAJEMEN INFORMATIKA	2012	D.III
36.	ENI YUSPITA, A.Md	19890907 202221 2 003	VII	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Terampil)	MANAJEMEN INFORMATIKA	2011	D.III
37.	AHMAD ZUHRI, A.Md	19901111 202221 1 001	VII	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Terampil)	MANAJEMEN INFORMATIKA	2015	D.III
38.	PERI, A.Md	19900111 202221 1 003	VII	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Terampil)	MANAJEMEN INFORMATIKA	2012	D.III
39.	NOVI, A.Md	19950815 202221 1 001	VII	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Terampil)	MANAJEMEN INFORMATIKA	2017	D.III

Sumber : DUK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2023

Berdasarkan table diatas, komposisi pegawai menurut pendidikan dapat direkap sebagai berikut:

**Tabel 9**  
Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Menurut Pangkat, Golongan Dan Pendidikan

NO	PANGKAT/GOL	TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	D III	S1/D4	S2	
1	I	-	-	-	-	-	-	0
2	II	-	-	4	2	-	-	6
3	III	-	-	1	2	14	1	18
4	IV	-	-	-	-	3	1	4
<b>JUMLAH</b>		-	-	5	4	17	2	28

Sumber : DUK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas memiliki 28 Pegawai Negeri Sipil dan 11 orang P3K, dengan pendidikan SD = 0, SLTP = 0 orang, SLTA = 5 orang, D III = 4 orang S1 = 17 orang dan S2 = 2 orang.

Sedangkan eselon yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 10**  
Eselon pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas

No.	Tingkat Eselon	Jabatan	Keterangan
1.	II/b	Kepala Dinas	Terisi
2.	III/a	Sekretaris Dinas	Terisi
3.	III/b	a. Kabid Pelayanan Kependudukan	Terisi
		b. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Terisi
		c. Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terisi
		d. Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi	Terisi

No.	Tingkat Eselon	Jabatan	Keterangan
		Pelayanan	
4.	IV/a	a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Terisi
		b. Kasubbag Keuangan	Terisi
		c. Kelompok Jabatan Fungsional	Terisi

## 7. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka menyelenggarakan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, pada Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas memiliki alokasi dana Belanja Langsung sebagaimana tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 6.993.898.896,00- (Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 6.958.896.818,00 (Enam Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah) atau sebesar 99,50 %.

Rincian realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 11  
 Target dan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Kabupaten Sambas Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Target/Jumlah Menurut DPA (Rp)	Sumber Dana	Realisasi	
				Real	Pers
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.469.895.553,00	APBD	4.442.617.519,00	99,38
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.186.376,00	APBD	37.186.376,00	100,00
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.016.728,00	APBD	3.016.728,00	100,00
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.421.264,00	APBD	4.421.264,00	100,00
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.178.981,00	APBD	3.178.981,00	100,00
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3.424.136,00	APBD	3.424.136,00	100,00
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3.323.045,00	APBD	3.323.045,00	100,00
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2.551.259,00	APBD	2.551.259,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Target/Jumlah Menurut DPA (Rp)	Sumber Dana	Realisasi	
				Real	Pers
	Kinerja SKPD				
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.270.963,00	APBD	17.270.963,00	100,00
<b>2.12.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>169.725.168,00</b>	<b>APBD</b>	<b>169.725.168,00</b>	<b>100,00</b>
2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	158.400.000,00	APBD	158.400.000,00	100,00
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.053.720,00	APBD	3.053.720,00	100,00
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.935.198,00	APBD	3.935.198,00	100,00
2.12.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.336.250,00	APBD	4.336.250,00	100,00
<b>2.12.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	<b>11.714.819,00</b>	<b>APBD</b>	<b>11.188.319,00</b>	<b>95,51</b>
2.12.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.861.377,00	APBD	3.334.877,00	86,36
2.12.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	2.328.345,00	APBD	2.328.345,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Target/Jumlah Menurut DPA (Rp)	Sumber Dana	Realisasi	
				Real	Pers
2.12.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.525.097,00	APBD	5.525.097,00	100,00
<b>2.12.01.2.05.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>779.277.109,00</b>	<b>APBD</b>	<b>778.409.037,00</b>	<b>99,89</b>
2.12.01.2.05.0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	41.490.000,00	APBD	41.490.000,00	100,00
2.12.01.2.05.03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	737.787.109,00	APBD	736.919.037,00	99,88
<b>2.12.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>983.336.948,00</b>	<b>APBD</b>	<b>982.823.614,00</b>	<b>99,95</b>
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.936.810,00	APBD	100.936.810,00	100,00
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	129.362.884,00	APBD	129.358.446,00	100,00
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	89.121.599,00	APBD	88.988.684,00	99,85
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	86.264.200,00	APBD	86.264.134,00	100,00
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.005.000,00	APBD	4.000.000,00	99,88
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	386.296.384,00	APBD	386.019.469,00	99,93

Kode Rekening	Uraian	Target/Jumlah Menurut DPA (Rp)	Sumber Dana	Realisasi	
				Real	Pers
	Konsultasi SKPD				
2.12.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	187.350.071,00	APBD	187.256.071,00	99,95
<b>2.12.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>739.280.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>726.069.750,00</b>	<b>98,20</b>
2.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	427.290.000,00	APBD	426.990.000,00	99,93
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	18.900.000,00	APBD	16.372.500,00	86,63
2.12.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	293.090.000,00	APBD	282.707.250,00	96,46
<b>2.12.01.2.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>288.471.352,00</b>	<b>APBD</b>	<b>282.669.347,00</b>	<b>99,50</b>
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.400.000,00	APBD	4.400.000,00	100,00
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	284.071.352,00	APBD	278.269.347,00	97,96
<b>2.12.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.395.051.993,00</b>	<b>APBD</b>	<b>1.338.694.287,00</b>	<b>99,54</b>
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	101.449.900,00	APBD	100.593.900,00	99,16

Kode Rekening	Uraian	Target/Jumlah Menurut DPA (Rp)	Sumber Dana	Realisasi	
				Real	Pers
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.750.000,00	APBD	53.686.000,00	99,88
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	109.999.000,00	APBD	105.905.000,00	96,28
2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.129.853.093,00	APBD	1.128.509.387,00	99,88
<b>2.12.01.2.13</b>	<b>Penataan organisasi</b>	<b>65.851.788,00</b>	<b>APBD</b>	<b>65.851.621,00</b>	<b>100,00</b>
2.12.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	61.890.676,00	APBD	61.890.509,00	100,00
2.12.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah	3.961.112,00	APBD	3.961.112,00	100,00
<b>2.12.02</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>1.509.028.954,00</b>	<b>APBD</b>	<b>1.508.742.482,00</b>	<b>99,98</b>
<b>2.12.02.2.01</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>1.230.043.969,00</b>	<b>APBD</b>	<b>1.229.823.547,00</b>	<b>99,98</b>
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	19.999.911,00	APBD	19.999.911,00	100,00
2.12.02.2.01.03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran	24.999.639,00	APBD	24.999.639,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Target/Jumlah Menurut DPA (Rp)	Sumber Dana	Realisasi	
				Real	Pers
	Penduduk				
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.165.044.492,00	APBD	1.164.844.860,00	99,88
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	19.999.927,00	APBD	19.979.137,00	99,90
<b>2.12.02.2.03.</b>	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>253.985.024,00</b>	<b>APBD</b>	<b>253.918.974,00</b>	<b>99,97</b>
2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	228.992.074,00	APBD	228.926.074,00	99,97
2.12.02.2.03.05	Sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk	24.992.950,00	APBD	24.992.900,00	100,00
2.12.02.2.04	<b>Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk</b>	<b>24.999.961,00</b>	<b>APBD</b>	<b>24.999.961,00</b>	<b>100,00</b>
2.12.02.2.04.03	Bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	24.999.961,00	APBD	24.999.961,00	100,00
<b>2.12.03</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>414.973.840,00</b>	<b>APBD</b>	<b>411.878.740,00</b>	<b>99,25</b>
<b>2.12.03.2.01</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>187.892.971,00</b>	<b>APBD</b>	<b>186.602871,00</b>	<b>99,31</b>

Kode Rekening	Uraian	Target/Jumlah Menurut DPA (Rp)	Sumber Dana	Realisasi	
				Real	Pers
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	20.000.640,00	APBD	20.000.640,00	100,00
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	167.892.331,00	APBD	166.602.231,00	99,23
<b>2.12.03.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>227.080.869,00</b>	<b>APBD</b>	<b>225.275.869,00</b>	<b>99,20</b>
2.12.03.2.02.01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadiln Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk Bagi Penduduk yang beragama Islam	20.000.030,00	APBD	20.000.030,00	100,00
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	157.080.746,00	APBD	156.085.746,00	99,37
2.12.03.2.02.08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	50.000.093,00	APBD	49.190.093,00	98,38
<b>2.12.03.2.03</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>0,00</b>	<b>APBD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.12.03.2.03.04	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	0,00	APBD	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Target/Jumlah Menurut DPA (Rp)	Sumber Dana	Realisasi	
				Real	Pers
2.12.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	536.281.516,00	APBD	532.699.522,00	99,33
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database	100.000.306,00	APBD	99.589.206,00	99,59
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	100.000.306,00	APBD	99.589.206,00	99,59
2.12.04.2.02.	<b>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	84.596.697,00	APBD	84.542.379,00	99,94
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	84.596.697,00	APBD	84.542.379,00	99,94
2.12.04.2.03.	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	335.854.764,00	APBD	332.815.675,00	99,10
2.12.04.2.03.03	Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	95.536.766,00	APBD	95.098.156,00	99,54
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	120.000.346,00	APBD	118.097.399,00	98,41

Kode Rekening	Uraian	Target/Jumlah Menurut DPA (Rp)	Sumber Dana	Realisasi	
				Real	Pers
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	25.806.159,00	APBD	25.806.159,00	100,00
2.12.04.2.03.06	Kerjasama dengan Organisasi Perguruan Tinggi	74.999.897,00	APBD	74.302.365,00	99,07
2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	19.511.596,00	APBD	19.511.596,00	100,00
<b>2.12.04.2.04.</b>	<b>Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>15.829.749,00</b>	<b>APBD</b>	<b>15.752.262,00</b>	<b>99,51</b>
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Peningkatan Data Kependudukan	15.829.749,00	APBD	15.752.262,00	99,51
<b>2.12.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFILKEPENDUDUKAN</b>	<b>63.719.033,00</b>	<b>APBD</b>	<b>62.958.555,00</b>	<b>98,81</b>
<b>2.12.05.2.01.</b>	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>63.719.033,00</b>	<b>APBD</b>	<b>62.958.555,00</b>	<b>98,81</b>
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	31.241.100,00	APBD	30.861.800,00	98,79
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta	32.477.933,00	APBD	32.096.755,00	98,83

Kode Rekening	Uraian	Target/Jumlah Menurut DPA (Rp)	Sumber Dana	Realisasi	
				Real	Pers
	Kebutuhan yang lain				
	<b>Total</b>	<b>6.993.898.896,00</b>	<b>APBD</b>	<b>6.958.896.818,00</b>	<b>99,50</b>

## **8. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

Proses perencanaan pembangunan untuk mendukung dan menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil diawali dengan penyusunan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan berpedoman pada RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya rencana program dan kegiatan dituangkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran. Dalam hal penyusunan rencana program dan kegiatan untuk mendukung urusan kependudukan dan catatan sipil, yang dimulai dari penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) sebagai dasar perencanaan pembangunan untuk melaksanakan urusan kependudukan dan catatan sipil yang akan dituangkan atau dijabarkan di dalam penyusunan RAPBD TA 2023.

Di dalam penyusunan RAPBD dimaksud, terutama untuk menyelenggarakan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan sasaran yang ingin dicapai berdasarkan RPJMD 2021 – 2026 yang menjadi pedoman kebijakan umum APBD 2023. Selanjutnya untuk mengimplementasikan RKA dimaksud setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Sambas mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang merupakan dasar bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## **9. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN**

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat serta professional perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sementara keberadaan SDM dan sarpras yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas saat ini sangat terbatas sehingga untuk dapat memaksimalkan kinerja masih terhambat. Sehingga untuk mencapai sasaran yang diinginkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat masih jauh dari harapan.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam mendukung kinerjanya antara lain :

- 1 Buah Server SIAK

- 1 Buah Server KTP el
- 2 Buah Server aplikasi
- 1 Buah Server Registrasi
- 4 buah Printer KTP el
- 3 buah Printer KIA
- 66 komputer
- 24 buah HP pelayanan
- 3 unit mobil operasional
- Ruang menyusui dan tempat bermain anak
- Ruang Pengaduan

Untuk kegiatan pelaksanaan KTP Elektronik di Kabupaten Sambas yang merupakan program strategis nasional secara umum berjalan dengan baik. Dari wajib e-KTP sebanyak 453.998 jiwa sampai dengan Desember Tahun 2023 berhasil direkam 443.820 wajib KTP Elektronik atau sekitar 97,76 %.

## **10. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

### **a. Permasalahan**

Masalah yang dihadapi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai berikut:

- Masih belum optimalnya pemuktahiran data penduduk berdasarkan Sistem Administrasi Kependudukan
- Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengelola teknologi informasi berkaitan dengan SIAK dan jaringan data
- Belum optimalnya system penyebarluasan informasi administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi (TI) dan system informasi penunjang berbasis TI lainnya
- Belum sepenuhnya masyarakat Kabupaten Sambas sadar akan pentingnya pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan

- Belum sepenuhnya masyarakat Kabupaten Sambas sadar akan pentingnya pencatatan sipil setiap peristiwa penting kependudukan.

b. Solusi

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas perlu mengambil langkah – langkah sebagai berikut :

- Meningkatkan pengelolaan data kependudukan Kab. Sambas
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui bimbingan teknis/pelatihan/diklat di bidang sistem informasi administrasi kependudukan (SI AK) dan jaringan data
- Mengoptimalkan sistem penyebaran informasi administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi dan penunjang berbasis TI lainnya
- Meningkatkan sosialisasi di bidang pelayanan pendaftaran penduduk melalui media elektronik serta peningkatan pelayanan mobile/jemput bola ke desa
- Meningkatkan sosialisasi di bidang pencatatan sipil melalui media elektronik serta peningkatan pelayanan mobile/jemput bola ke desa.

## 11. HAL – HAL LAIN YANG PERLU DILAPORKAN

1. Dalam melaksanakan urusan kependudukan dan catatan sipil jumlah dana Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung berjumlah Rp. 10.565.787.200,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.10.519.520.512,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah) atau sebesar 99,56 %. Belanja langsung dan Tidak Langsung dengan rincian menurut jenis belanja sebagai berikut:
  - a. Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp 3.571.888.304,00 dan terealisasi Rp 3.560.623.694,00. Atau terealisasi sebesar 99.68%
  - b. Belanja Barang dan Jasa Rp 6.993.898.896,00 dan terealisasi Rp 5.530.896.068,00 Atau terealisasi sebesar 79,08 %

- c. Belanja Modal Rp. 1.441.700.000,00 dan terealisasi Rp 1.428.000.750,00  
Atau terealisasi sebesar 99,05%

Semua anggaran tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan ketentuan yang berlaku.

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas telah melakukan sosialisasi Pelaksanaan Pencetakan KTP-el di Kabupaten Sambas. KTP el mulai Perekaman di Kabupaten Sambas pada bulan Juni 2012 dan serempak di semua kecamatan pada bulan Juli tahun 2012. Kepemilikan KTP el pada tahun 2023 telah mencapai 443.820 jiwa dari 453.998 penduduk wajib KTP. Dengan demikian persentase penduduk wajib KTP yang telah mempunyai KTP adalah 97,76% dari total yang belum merekam tersebut sebagian besar adalah pelajar SMA/SMK sederajat dan belum semua anak yang sudah berusia 17 tahun memahami akan pentingnya KTP-el. Jumlah penduduk yang memiliki Kartu Keluarga pada Tahun 2023 adalah 196.649 KK.
3. Pengurusan akte catatan sipil pada tahun 2023 untuk persentase kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2023 adalah 61,24 %.

## 12. PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas merupakan laporan sub kegiatan/ kegiatan/ program yang berjalan selama tahun 2023 Dari realisasi program dan kegiatan yang telah dicapai, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berusaha melaksanakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil secara optimal, meskipun masih menghadapi keterbatasan anggaran, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana kantor.

Demikian LPPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2023 ini disusun yang tentunya masih mempunyai kekurangan-kekurangan di dalamnya. Semoga LPPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan Sipil.

Sambas, Januari 2024  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SAMBAS  
  
HI WAHIDAH SE., M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680530 199403 2 005